

BAB II

MENJELANG KEDATANGAN JEPANG KE INDONESIA

2.1 Sebelum Kedatangan Jepang Ke Indonesia

Hubungan antara Jepang dengan Hindia Belanda telah berlangsung sejak lama, lebih jauh lagi terdapat kaitan dengan VOC.³³ Orang-orang Jepang pada umumnya dijadikan sebagai serdadu dan bekerja pada kapal-kapal dagang milik VOC, dibuktikan dengan adanya sebuah kedudukan “*kapitein der jappers*” yang sudah terbentuk sejak 1616. Maka tidak mengherankan pada tahun 1620 di Batavia bisa dijumpai kelompok burger³⁴ Jepang, bahkan mereka juga turut ikut dalam kegiatan komersial bersama orang-orang Eropa.³⁵

Walaupun demikian, kehadiran penduduk Jepang di Batavia tidak berlangsung lama, karena adanya kebijakan pintu tertutup³⁶ yang dilakukan oleh Shogun Tokugawa pada tahun 1635 menghentikan kedatangan penduduk Jepang ke Batavia, satu tahun setelahnya pada 1636 mengeluarkan kebijakan melarang penduduk Jepang di seberang lautan untuk kembali ke Jepang.³⁷ Pasca kebijakan

³³ VOC atau *Vereenigde Oostindische Compagnie*, atau persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki aktivitas di Hindia-Timur. Lihat: The Editor of Encyclopedia Britannica, “Dutch East India Company,” *Encyclopedia Britannica*, 2023, <http://www.britannica.com/money/topic/Dutch-East-India-Company>. Diakses pada: 10 Juli 2023

³⁴ Burger dalam bahasa Belanda dapat diartikan sebagai masyarakat sipil. Lihat: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/dutch-english/burger>. Diakses pada: 20 Agustus 2023.

³⁵ Mona Lohanda, *Unsur Non-Pribumi Di Batavia Pada Abad Ke-17*, ed. R.Z. Leirissa (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan dokumentasi Sejarah Nasional, 1995). hlm. 101.

³⁶ politik pintu tertutup atau politik isolasi merupakan sebuah cara yang dilakukan suatu negara untuk menutup diri dan berusaha untuk tidak menarik perhatian luar demi melindungi kepentingan negaranya. Lihat: Yusy Widarahesty and Rindu Ayu, “Pengaruh Politik Isolasi (Sakoku) Jepang Terhadap Nasionalisme Bangsa Jepang : Studi Tentang Politik Jepang Dari Zaman Edo (Feodal) Sampai Perang Dunia II,” *Jurnal Al-Azhar Indonesia seri Pranata Sosial* 1, no. 1 (2011): 46–62. hlm. 49

³⁷ Lohanda, *Unsur Non-Pribumi Di Batavia Pada Abad Ke-17*, *Loc.cit.*

pintu tertutup sebenarnya hubungan antara Jepang dan Belanda masih terjalin, dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh pihak Shogun Tokugawa.

Kegiatan ekonomi dengan Belanda terkonsentrasi di wilayah Nagasaki,³⁸ sejatinya pemerintah Tokugawa masih membutuhkan perdagangan dengan bangsa asing, walaupun dalam masa itu pemerintah sendiri menerapkan politik isolasi. Kebutuhan akan informasi menjadikan pemerintah Tokugawa dengan terpaksa harus menerapkan zona perdagangan eksklusif. Dalam hal ini bangsa Jepang juga menjalin kerja sama perdagangan dengan bangsa asing, salah satunya adalah Belanda. Para pedagang bangsa Belanda disamping melakukan aktivitas perdagangan juga menjadi agen yang memberi informasi tentang dunia luar kepada Jepang.

Pemerintah Tokugawa dapat mengetahui perkembangan dan informasi mengenai dunia luar melalui para pedagang Belanda. Sehingga bisa dikatakan Belanda merupakan mata dari pemerintah Tokugawa untuk mengetahui dunia luar, berkat itu juga pemerintah Jepang mengetahui beberapa kejadian penting termasuk Revolusi Prancis pada akhir abad ke-18 dan Perang Candu antara Inggris dengan China pada tahun 1840-1842.³⁹ Pemerintah Tokugawa juga berusaha mendapatkan ilmu pengetahuan melalui hubungan dengan Belanda. Beberapa buku ilmu astronomi dan kedokteran barat berbahasa Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa

³⁸ "... kebijakan luar negeri Jepang merupakan gambaran dari masyarakat yang batas-batasnya dibatasi (politik isolasi) dan karakternya dilindungi oleh kebijakan *sakoku*, hal tersebut membatasi kontak Jepang dengan bangsa luar hampir seluruhnya, kendati demikian perdagangan yang diatur ketat masih terjadi dengan Belanda dan China melalui daerah Nagasaki, dengan China melalui kepulauan Ryukyu, dan dengan Korea melalui Tsushima." Lihat :Conrad Totman, "From Sakoku to Kaikoku The Transformation of Foreign-Policy Attitudes" *Journal of Monumenta Nipponica* 35, no. 1 (1980): 1-19. p. 5

³⁹ Susy Ong, *The New Seikatsu Kaizen* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, 2019). hlm. 6-5.

Jepang, dengan ini kalangan terpelajar Jepang bisa menguasai ilmu astronomi dan kedokteran modern kendati dilarang keluar negeri.

2.1.1 Pandangan Jepang terhadap kepulauan Selatan

Gagasan ekspansionisme merupakan titik kunci dari pandangan Jepang terhadap *Nanyō*⁴⁰ atau wilayah selatan, gagasan itu tumbuh dan berkembang beriringan dengan kemajuan negara Jepang. Setidaknya terdapat dua gagasan ekspansionisme yang dimiliki oleh Kekaisaran Jepang, pertama *hokushi-ron* (Ekspansi ke Utara) dan *nanshin-ron* (Ekspansi ke Selatan).⁴¹ Kedua gagasan itu kemudian menjadi dasar dari ekspansionisme yang dilakukan Jepang pada beberapa wilayah di Asia. Pandangan Jepang yang tercermin dalam gagasan *nanshin-ron* dapat dibedakan menjadi tiga periode jika dilihat berdasarkan periode waktunya.

Dalam prosesnya gagasan *nanshin-ron* atau kebijakan ke Selatan sangat dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri Kekaisaran Jepang. Periode pertama gagasan *nanshin-ron* terjadi pada era Meiji, dasar gagasannya merupakan dampak dari slogan “*datsua nyūō*”⁴² yang berusaha menjauhkan diri dari Asia. Sikap itu

⁴⁰ *Nanyō* dapat didefinisikan sebagai wilayah selatan diseborang lautan samudera Pasifik, sehingga menurut terminologi ini Asia Tenggara termasuk ke dalamnya. Lihat: Hajime Shimizu, “Nanshin-Ron: It’s Turning Point in World War I,” *Journal of Developing Economies* XXV, no. 4 (1987): pp.386-401. p. 386.

⁴¹ *Nanshin-ron*, atau kebijakan ekspansi ke selatan, merupakan istilah kebijakan ekspansionisme Jepang, dalam pandangan ekspansionis ini tidak hanya terhadap pertahanan saja melainkan eksistensinya sebagai sebuah bangsa, termasuk didalamnya pembangunan ekonomi dan kebijakan luar negeri. Lihat: Ibid. *Nanshin-ron* juga termasuk doktrin pertahanan bersama dengan *Hokushin-ron*, jelasnya strategi *Nanshin Hokushi-ron* (bertahan di selatan dan maju di utara, yang dipegang oleh tentara angkatan darat Kekaisaran Jepang) dan *Hokushin Nanshin-ron* (bertahan di utara dan maju di selatan, dipegang oleh tentara angkatan laut Kekaisaran Jepang). Kedua strategi tersebut terlahir pada February 1907 dalam Imperial National Defence guideline. Lihat: Hajime Shimizu, “Southeast Asia in Modern Japanese Thought The Development and Transformation of Nanshin-Ron.” (Australian Nasional University, 1980)., P. 31-35.

⁴² *Datsua Nyūō*, merupakan sebuah slogan atau motto yang dapat diartikan sebagai menjauh dari Asia, dan bergabung dengan Eropa. Motto ini hadir sebagai akibat dari restorasi meiji, Jepang menganggap bangsa Asia sebagai bangsa terbelakang dibandingkan dengan bangsa Eropa yang modern. Lihat: Michio Kitahara, “The Rise of Four Mottoes in Japan: Before and After the Meiji

secara langsung menempatkan diri untuk bekerja sama dengan orang-orang Eropa. Dampak langsungnya adalah melahirkan sebuah kebijakan luar negeri untuk bekerja sama dengan semua negara. Bisa dikatakan pada periode ini pemerintah Jepang masih berhati-hati terhadap wilayah yang masih dalam kendali bangsa Eropa, termasuk di dalamnya wilayah Asia Tenggara. Pemerintah kekaisaran Jepang masih dalam upaya untuk membangun diri sebagai bangsa modern, dan dalam prosesnya ini sangat memerlukan bangsa Eropa.

Gagasan *nanshin-ron* pada era Meiji dipandang sebagai langkah strategis negara untuk membuat landasan kuat yang dibangun berdasarkan kemakmuran perdagangan internasional, serta mewujudkan perdagangan bebas yang menjadi tujuan jangka panjang, dengan kekuatan armada laut sebagai penunjang utamanya.⁴³ Gagasan *nanshin-ron* pada periode ini lebih mengedepankan aspek kerja sama dalam hal ekonomi dan perdagangan ke wilayah-wilayah Kepulauan Pasifik, Australia, dan Amerika Utara-Selatan. Kendati gagasan *Nanshin-ron* pada periode ini tidak sepenuhnya bebas dari gagasan ekspansionisme, namun dalam praktiknya hanya diarahkan pada kemajuan perdagangan secara damai di kawasan wilayah selatan (*nanyō*) tanpa adanya perebutan wilayah melalui agresi.

Menjelang periode kedua, diawali dengan serangkaian kemenangan Jepang pada beberapa peperangan, seperti kemenangan melawan Dinasti Qing pada perang Sino-Jepang pertama (1894-1895)⁴⁴ dan melawan Kekaisaran Rusia pada perang

Restoration,” *Journal of Asian History* Vol. 20, no. 1 (1986): 54–64, <https://jstor.org/stable/419305-90>, p. 59-60.

⁴³ Shimizu, “Nanshin-Ron: It’s Turning Point in World War I.” *Loc.cit.*

⁴⁴ The Editor of Encyclopedia Britannica, “First Sino-Japanese War,” *Encyclopedia Britannica*, 2023, <http://www.britannica.com/event/First-Sino-Japanese-War-1894-1895>. Diakses pada 02 Agustus 2023.

Russo-Jepang (1904-1905)⁴⁵ kedua peperangan itu berhasil dimenangkan oleh Jepang mengawali kebijakan ekspansionisme ke arah utara dari Kekaisaran Jepang. Dalam hal ini salah satu kebijakan awal *hokushin-ron* sudah dilaksanakan, sehingga pemerintah Jepang lebih memilih untuk melakukan ekspansi ke arah Utara. Kebijakan *hokushin-ron* dianggap memiliki keuntungan praktis dan atas pengalaman sebelumnya Jepang merasa mampu untuk melakukan ekspansi lagi ke arah utara.

Secara praktis Kekaisaran Jepang memilih untuk melanjutkan gagasan *hokushin-ron*, walaupun begitu gagasan *nanshin-ron* tidak sepenuhnya ditinggalkan, dan bahkan mengalami perkembangan. Pasca kenaikan takhta kaisar *Taishō*⁴⁶ memengaruhi pandangan Jepang terhadap gagasan *nanshin-ron*. Gagasan tentang *nanshin-ron* pada periode ini dipengaruhi kebijakan pasca perang dengan usaha utama untuk merekonstruksi kebijakan ekonomi dan keuangan. Walaupun begitu kondisi sosial-politik wilayah Tiongkok mengakibatkan terganggunya kegiatan ekonomi dengan negara Jepang. Namun tidak berlangsung lama perang dunia pertama pecah pada 1914, dan sekaligus menjadi kunci perubahan pada gagasan *nanshin-ron* pada periode ini.

Perang dunia pertama membuat perubahan signifikan terhadap gagasan *nanshin-ron*, utamanya berkaitan dengan kegiatan perdagangan yang terhambat karena kondisi peperangan. Kondisi itu memberikan kesempatan bagi Kekaisaran

⁴⁵ The Editor of Encyclopedia Britannica, "Russo-Japanese War," *Encyclopedia Britannica*, 2023, <http://www.britannica.com/event/Russo-Japanese-War>. Diakses pada 02 Agustus 2023.

⁴⁶ Periode *Taishō* merupakan sebuah periode dalam Kekaisaran Jepang, yang dimulai dari kenaikan takhta dari Kaisar Yoshito dari tahun 1912-1926. Lihat: The Editor of Encyclopedia Britannica, "Taishō Period," *Encyclopedia Britannica*, 2012, <https://www.britannica.com/event/Taisho-period>. Diakses pada 02 Agustus 2023.

Jepang untuk mengambil alih perdagangan yang terhambat itu, dengan menjual makanan, tekstil dan barang-barang lainnya yang memiliki nilai jual di wilayah selatan (*Nanyō*).⁴⁷ Pada periode perang dunia ini Jepang mengambil keuntungan terbaik dan membuat produk Jepang bisa memasuki pasar Asia. Melalui kondisi ini juga pemerintah Jepang mulai berusaha untuk menanamkan pengaruh ekonomi dan politiknya di wilayah selatan.

Secara umum pandangan Jepang terhadap wilayah Selatan pada periode ini (*Taishō Nanshin-ron*) merupakan tindakan untuk menanamkan pengaruh politik dan ekonominya, dengan pertimbangan proses seleksi dan eliminasi yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri bangsa lain.⁴⁸ Akibatnya pemerintah Jepang harus mencari legitimasi agar tindakannya diterima oleh masyarakat yang pada saat itu sebagian besar mendukung kebijakan *hokushin-ron*. Legitimasi diputuskan dengan menimbang hubungan antara Jepang dan wilayah Selatan yang ditinjau dari berbagai aspek, seperti geografis, sejarah, dan budaya. Sebetulnya legitimasi ini mengawali dari pandangan positif Jepang terhadap wilayah Selatan, berbanding terbalik pada periode sebelumnya yang berusaha menjauhkan diri dari kebudayaan Asia.

Bahkan legitimasi ini, kemudian akan diperluas pada periode selanjutnya dengan menghubungkannya dengan konsep *Hakko Ichiu*.⁴⁹ Kebijakan *Taishō*

⁴⁷ Shimizu, "Nanshin-Ron: It's Turning Point in World War I." *Op.cit.* p.389-390.

⁴⁸ Kondisi ideal itu karena terbatasnya ruang gerak yang dapat dilakukan Jepang untuk ekspansionismenya. Seperti kebijakan "*Anti-Japanese Land Act*" oleh pemerintah US pada tahun 1913, dan kebijakan "*White Australian Policy*" oleh pemerintah Australia pada 1901. Kondisi itu membuat tidak ada pilihan lain, selain bergerak menuju wilayah Selatan. Lihat: *Ibid.* p. 390-362.

⁴⁹ *Hakko ichiu* dalam konsep modern Jepang muncul pada abad ke 12, dan digunakan tahun 1940 oleh Konoe Fumimaro seorang perdana menteri Jepang membuka manifesto dalam Fundamental National Policy (*Kihon kokusaku yoko*) dengan penyelipan kalimat, 'tujuan utama Jepang dalam dasar kebijakan Jepang adalah mewujudkan perdamaian dunia dengan semangat

Nanshin-ron ini tetap dipegang oleh Jepang, walaupun tindakan Jepang terhadap wilayah selatan hanya sebatas kerja sama strategis dalam hal ekonomi. Era *Taishō* bisa dikatakan sebagai periode liberal Kekaisaran Jepang, walaupun begitu berbagai peristiwa turut membuat padangan masyarakat Jepang terhadap periode ini menjadi negatif, sekaligus menjadi ancang-ancang menuju era militeristik kekaisaran Jepang.

Periode terakhir mengenai gagasan *nanshin-ron* terjadi berteepatan dengan perubahan terjadi di dalam negeri Jepang. Kenaikan takhta Kaisar Shōwa serta kemelut politik membuat Jepang mengalami perubahan signifikan, Jepang menjadi negara militeristik dan menganut ultranasionalisme. Sejalan dengan itu terdapat pula perkembangan *nanshin-ron* pada periode *Shōwa*, secara sederhana hal itu merupakan kelanjutan dari prinsip *nanshin-ron* pada periode *Taishō*. Dalam pandangan *nanshin-ron* pada periode ini pandangan terhadap wilayah selatan merupakan kepanjangan dari konsep dasar ‘*demi kemakmuran bersama asia timur raya*.’⁵⁰ Dengan kata lain pada periode ini wilayah selatan dipandang sebagai keinginan kuat Jepang untuk menguasai wilayah tersebut sepenuhnya.

Dalam pandangan Jepang wilayah selatan dipandang sebagai wilayah Asia yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah dan memiliki keuntungan dalam hal letak geografisnya. Secara khusus Kekaisaran Jepang pada periode ini sudah merasa setara dengan bangsa Eropa, bahkan Jepang sudah memiliki

hakko ichiu ... dan pondasi utama, pertama mencapai kemakmuran Asia Timur Raya (*Greater East Asia*)’ dalam pandangan masyarakat Jepang pandangan yang saling bertolak belakang itu sangat dipercayai, dan bahwa tugas mereka adalah tugas suci (*divine message*) untuk membebaskan (perang suci/*holy war*) dari cengkaman bangsa Eropa. Lihat: Purdy, “Hakko Ichii: Projecting Greater East Asia.” p. 108.

⁵⁰ Shimizu, “Nanshin-Ron: It’s Turning Point in World War I.”, p. 387.

keberanian untuk membidik wilayah koloni bangsa Eropa di wilayah Selatan. Oleh sebab itu Jepang membalut keinginan akan penguasaan penuh wilayah Selatan dengan dalih untuk membebaskan bangsa Asia dari cengkeraman penjajahan. Jepang menganggap dirinya sendiri memiliki tanggung jawab moral untuk bisa memerdekakan bangsa Asia.

2.1.2 Migrasi Awal Jepang ke Hindia-Belanda

Pasca Restorasi Meiji⁵¹ hubungan Jepang dengan Hindia-Belanda terus berlanjut, migrasi yang sebelumnya dilarang pada periode pintu tertutup kembali dilaksanakan setelah dibukanya hubungan dagang resmi antara Jepang dan Hindia-Belanda pada tahun 1896.⁵² Restorasi Meiji membawa angin perubahan dalam pemerintahan Jepang, termasuk di dalamnya perkembangan pesat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Jepang. Perkembangan tersebut diarahkan agar sesuai dengan kebijakan nasional Jepang untuk mencapai *Fukoku Kyōhei* (negara kaya, militer kuat),⁵³ salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan industrialisasi. Pemerintah Jepang mendatangkan ahli-ahli bangsa Eropa, serta mengirim golongan

⁵¹ Restorasi Meiji merupakan sebuah masa dalam sejarah Jepang yang dimulai dengan kejatuhan kekuasaan Shogun Tokugawa pada sekitar tahun 1868. “Dalam masa ini terjadi pemulihan kekuasaan kaisar untuk memerintah Jepang setelah sebelumnya dikuasai oleh Shogun Tokugawa.” Lihat: Intannia Cahyasari and Anwar Efendi, “Realitas Politik Era Restorasi Meiji Dalam Novel Hanauzumi Karya Jun’Ichi Watanabe,” *Poetika: Jurnal Ilmu Sastra* VI, no. 2 (2018): 79–96. hlm. 83.

⁵² Lohanda, *Unsur Non-Pribumi Di Batavia Pada Abad Ke-17*, *Op.cit.*, hlm. 102.

⁵³ *Fukoku Kyōhei* merupakan konsep untuk memodernisasi Jepang dengan menggunakan teknologi-ilmu pengetahuan bangsa Eropa untuk memperoleh keunggulan dominasi militer dan secara dinamis mengubah sosial-ekonomi Jepang menuju negara kaya. Latar belakang adanya konsep ini adalah untuk menggunakan teknologi-ilmu pengetahuan bangsa Eropa dan menggunakannya untuk melawan ancaman dominasi bangsa Eropa, serta mencegah peristiwa Matthew C. Perry terulang kembali. Lihat: Kitahara, “The Rise of Four Mottoes in Japan: Before and After the Meiji Restoration.” p. 55-56.

intelektual ke luar negeri dengan harapan teknologi dan ilmu pengetahuan Jepang bisa berkembang, dan menjadi negara yang setara dengan bangsa Eropa.

Namun modernisasi yang dilakukan Jepang agaknya berjalan tidak merata, industrialisasi hanya berkembang didaerah perkotaan saja. Sebaliknya wilayah pedesaan yang didominasi sebagai petani menjadi termarginalkan, hingga berujung pada kemiskinan. Kondisi kemiskinan membuat masyarakat pedesaan (umumnya laki-laki) memutar otak untuk keluar dari jurang kemiskinan, salah satunya dengan melakukan migrasi ke luar negeri. Kendati demikian akses terhadap pendidikan juga membuat terbatasnya pilihan negara tujuan untuk bermigrasi. Kalangan pedesaan umumnya lebih memilih negara-negara Asia Tenggara (*Nanyō*) atau dalam hal ini Hindia-Belanda karena menganggap kegiatan perdagangan tradisional dapat berkembang, karena hal ini juga dorongan untuk berdagang menjadi salah satu faktor utama dipilihnya wilayah Asia Tenggara.

Kebanyakan para pencari nafkah yang melakukan migrasi ke Hindia-Belanda berasal dari keluarga miskin di wilayah Selatan Jepang. Bahkan pada periode Meiji wilayah Kyushu terkenal dengan banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan, tanah yang tandus, serta dikelilingi oleh pegunungan yang gersang.⁵⁴ Kondisi alam dan didukung dengan kebijakan pemerintah Meiji (1868-1912) yang tidak berpihak kepada petani hingga melahirkan over-ruralisasi,⁵⁵ kondisi yang tepat untuk melakukan migrasi ke luar negara Jepang.

⁵⁴ Wilayah-wilayah Kyuushu dengan penduduk miskin terbanyak adalah di Semenanjung Shimabara (Prefektur Nagasaki), dan Pulau Amakusa (Prefektur Kumamoto). Lihat: James Francis Warren, "Karayuki-San of Singapore: 1877-1941," *Journal of Malaysian Branch of The Royal Asiatics Society* Vol. 62, no. 2 (1989): pp.45-80., p. 48.

⁵⁵ Over-ruralisasi merupakan kondisi jumlah penduduk di pedesaan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah yang dijamin dalam ekonominya. Lihat: J.W. Schoorl, *Modernisasi:*

Arus migrasi orang Jepang ke Hindia-Belanda pada awal abad ke-20 secara umum dapat dipisahkan menjadi tiga fase yaitu:

1. Fase Pertama, yaitu dari tahun 1880-an sampai akhir tahun 1910-an pada fase pertama mayoritas perantau Jepang berprofesi dalam *improper-trades* seperti menjalankan aktivitas prostitusi dan usaha rumah-rumah bordil, Sebagian kecil dari itu terlibat dalam profesi pertanian, perikanan, dan perdagangan.⁵⁶
2. Fase kedua, yaitu dari tahun 1910-an sampai tahun 1930-an fase kedua ditandai dengan perubahan profesi perantau Jepang di Hindia-Belanda, kendati profesi *improper-trades* masih dilakukan sebagian perantau. Fase kedua bisa dikatakan sebagai fase penetrasi pertama ekonomi Jepang ke Hindia-Belanda, produk-produk Jepang mulai beredar di Hindia-Belanda. Hal ini sejalan dengan mayoritas perantau berprofesi dalam kegiatan perdagangan, seperti profesi pedagang toko bebas, dan pegawai.⁵⁷
3. Fase ketiga, yaitu dari tahun 1930-an sampai tahun 1942 fase ketiga sering disebut sebagai fase penetrasi lanjutan ekonomi Jepang. Pada fase ketiga kebijakan ekonomi Jepang memandang Hindia-Belanda sebagai pasar strategis yang mendatangkan keuntungan devisa bagi Jepang. Kebanyakan

Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang, ed. R.G. Soekarjo (translator), Cet. 5. (Jakarta: Gramedia, 1988)., hlm. 266.

⁵⁶ Profesi *improper-trades* umumnya dilakukan oleh perempuan muda Jepang, mereka mengidentifikasi sebagai *karayuki-san* atau perempuan yang bekerja dibidang prostitusi. Lihat: Sri, "Dari Kyuushuu Ke Ran'in: Karayuki-San Dan Prostitusi Jepang Di Indonesia (1885-1920)." *Op. cit.*, hlm. 139.

⁵⁷ Saya Shiraishi and Takashi Shiraishi, *Orang-Orang Jepang Di Kota Koloni Asia Tenggara* (Jakarta: Obor Indonesia, 1998)., hlm.12.

profesi perantau Jepang berfokus dalam kegiatan perdagangan dan jasa, sejalan dengan adanya beberapa aset Jepang di Hindia-Belanda.⁵⁸

Fase pertama bisa juga dikatakan sebagai periode perintis, sehingga keberhasilan dan kegagalan para perantau Jepang pada periode ini akan memengaruhi perantau Jepang selanjutnya. Tercatat selama fase pertama pada tahun 30 Meiji (1897) jumlah penduduk Jepang yang bermigrasi ke Hindia-Belanda diperkirakan sekitar 125 orang, terdiri atas 25 laki-laki dan 100 perempuan. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan, malahan menjelang fase kedua pada tahun 42 Meiji (1909) terdapat 614 orang Jepang, terdiri dari 166 laki-laki dan 448 perempuan.⁵⁹ Sebenarnya dominasi perempuan yang bermigrasi ke Asia Tenggara pada periode ini mengindikasikan profesi utama para imigran perempuan itu adalah pekerjaan yang berkenaan dengan *improper-trades* seperti menjalankan aktivitas prostitusi dan usaha rumah-rumah bordil.

Oleh karena itu, pada periode ini keberhasilan dari orang yang pergi merantau ke Hindia-Belanda kebanyakan berasal dari kaum perempuan. Apalagi terdapat istilah *kara kudari*⁶⁰ pada masyarakat rural Jepang yang dapat diartikan sebagai perempuan yang berhasil kembali dari perantauan. Tampaknya hal itu menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan perantau perempuan Jepang ke

⁵⁸ Beberapa aset milik Jepang di Hindia-Belanda berada di Surabaya, yang terdiri atas tiga bank Jepang (Mitsui Bank, Bank of Taiwan, Yokohama Specie Bank), tujuh import/export house, dua hotel, dan banyak bisnis kecil termasuk 40 toko, dua restoran, serta sebagian kecil toko aksesoris artisan. Lihat: Howard Dick, "Japan's Economic Expansion in The Netherland Indies between the First and Second World Wars," *Journal of Southeast Asian Studies* Vol. 20, no. 2 (1989): 244–272, <https://www.jstor.org/stable/200710>, p. 252.

⁵⁹ Sri, "Dari Kyuushuu Ke Ran'in: Karayuki-San Dan Prostitusi Jepang Di Indonesia (1885-1920)." *Loc. cit.*

⁶⁰ *kara kudari* dapat diartikan sebagai *karayuki-san* yang sukses dan kembali ke Jepang dengan membawa materi yang berlimpah, termasuk uang, emas, dan perhiasan. Lihat: *Ibid.*, hlm. 142.

Hindia-Belanda. Disamping itu kebanyakan perantau merupakan masyarakat rural yang tidak bisa bertahan dalam kehidupan modern Jepang, mereka kemudian bertekad untuk memulai kehidupan baru di tanah seberang lautan. Keberhasilan dari orang yang pergi merantau ke Hindia-Belanda rupanya memberikan peningkatan jumlah perantau Jepang ke Hindia-Belanda.

Menjelang fase kedua pemerintah Jepang mulai memandang kawasan Asia Tenggara (*Tonan Ajia*) sebagai kawasan strategis. Pemerintah Jepang berusaha memaksimalkan kebijakannya untuk berekspansi ke selatan, sebagai langkah awal Pemerintah Jepang membuka konsulat pertama Jepang di Batavia pada tahun 1909.⁶¹ Pembukaan konsulat dapat diartikan politis sebagai perpanjangan tangan sekaligus perwakilan resmi pemerintah Jepang di Hindia-Belanda. Melalui konsulat pemerintah Jepang bisa melakukan kerja sama bilateral dengan pemerintah Hindia-Belanda. Perkembangan ekonomi pada periode kedua tidak dapat dilepaskan dari pandangan awal Jepang pada gagasan *Taishō Nanshin-ron*, yang berusaha mengembangkan perekonomian Jepang ke mancanegara.

Selain itu, pemerintah Jepang juga turut mendanai dan mendirikan *Nanyō kyōkai* pada tahun 1915. *Nanyō kyōkai* merupakan asosiasi Asia Tenggara dengan tujuan pendiriannya adalah untuk mengisi kesenjangan pengetahuan mengenai wilayah selatan termasuk mengenai sosial-budaya, mendorong interaksi dan kerja sama ekonomi berkelanjutan, serta mensosialisasikan informasi mengenai Asia

⁶¹ Konsulat pertama Jepang di Hindia-Belanda bertempat di Batavia, disusul pada tahun 1921 dengan konsulat kedua di Surabaya. Lihat: Saya Shiraishi, *Orang-Orang Jepang Di Kota Koloni Asia Tenggara.*, *Op.cit.*, hlm.23

Tenggara, dan membina SDM terlatih yang akan berkarier di Asia Tenggara.⁶² Asosiasi ini merupakan perhatian khusus pemerintah Jepang mengenai wilayah Asia Tenggara. Harapannya dengan adanya asosiasi ini kendala-kendala yang menyulitkan penetrasi Jepang ke Asia Tenggara bisa diatasi.

Bisa dikatakan Fase kedua merupakan fase penguatan hubungan antara Jepang dan Hindia-Belanda. Perhatian pemerintah Jepang terhadap Asia Tenggara seperti yang telah disebutkan sebelumnya memberikan sebuah hasil gemilang. Kegiatan ekspor-impor antara Jepang dan Hindia-Belanda mencapai titik seimbang dan pada beberapa waktu mengalami peningkatan. Tercatat setelah asosiasi Asia Tenggara didirikan nilai persentase kegiatan ekspor produk Jepang ke Hindia-Belanda mengalami peningkatan. Pada tahun 1914 nilai ekspor Jepang sekitar 2 % namun pada tahun 1920 nilai ekspor Jepang meningkat sampai 10.7%, sedangkan nilai impor secara persentase mengalami kenaikan dari tahun 1914 sebesar 7.2% menjadi 7.3% pada tahun 1920.⁶³

Meskipun kita tidak bisa menyampingkan peristiwa Perang Dunia I pada periode 1914-1918, Jepang dalam hal ini mengambil kesempatan untuk mengembangkan perekonomiannya ke Hindia-Belanda. Langkah yang diambil Jepang cukup tepat, pasar Asia yang sebelumnya dikuasai Eropa perlahan berubah menjadi menggunakan produk Jepang. Ditambah pengetahuan mengenai pasar Asia telah dimiliki Jepang yang secara perlahan melakukan analisis pasar melalui *Nanyō*

⁶² Susy Ong, *Shakai Kaizo* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, 2019).

⁶³ Dick, "Japan's Economic Expansion in The Netherland Indies between the First and Second World Wars." *Op.cit.*, p. 252.

kyōkai, sehingga peristiwa perang menjadi katalis dominasi ekonomi Jepang di Hindia-Belanda.

Peningkatan nilai ekspor Jepang juga sejalan dengan peningkatan perantau Jepang ke Hindia-Belanda. Tercatat pada tahun 1920 terdapat 4.148 orang, hingga akhir 1922 jumlah perantau di Hindia Belanda mengalami peningkatan menjadi 4.496.⁶⁴ Sebagian besar perantau Jepang di Hindia-Belanda pada periode ini berprofesi sebagai pedagang dan importir produk Jepang. Alasannya produk Jepang memerlukan importir di Hindia-Belanda, biasanya importirnya merupakan penduduk Jepang sendiri. Masyarakat Jepang mengambil peluang ini sebagai kesempatan untuk merantau di Hindia-Belanda.

Adapun faktor lain yang memotivasi untuk merantau ke Hindia-Belanda adalah tersiarnya berita keberhasilan orang-orang Jepang yang berniaga ke tanah Jawa. Majalah seperti *Shin-Seinen (New Youth)* sering kali mengangkat kisah kesuksesan orang Jepang yang merantau ke Jawa. Ditambah beberapa lagu yang mengangkat tema perantauan, seperti *Bazoku no uta* (Lagu Bandit Berkuda) dan *Rurō no uta* (lagu Pengembara) sangat populer diantara anak-anak muda di pedesaan Jepang.⁶⁵ Informasi tersebut memantik harapan beberapa orang Jepang untuk pergi dan meraih kesuksesan di tanah seberang lautan.

⁶⁴ Mona Lohada, "Penetrasi Jepang di Perairan Hindia-Belanda" prasarana yang disampaikan dalam seminar sehari Membangun Kembali Peradaban di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Depok, 24 April 1997., hlm.3.

⁶⁵Beberapa lirik lagu menggambarkan keinginan untuk pergi meninggalkan Jepang, seperti dalam *Bazoku no uta* terdapat lirik "...Aku akan pergi, jadi ikutlah denganku. Kami lelah hidup ditanah terpencil Jepang." Selain itu lirik yang sama juga dapat ditemui dalam lagu *Rurō no uta*, "...Menjelajah, dan Berkelana, beberapa pergi ke utara ke daerah Siberia, sementara yang lain pergi ke Selatan ke daerah Jawa." Lihat: Kenichi Gotō, "Life and Death of 'Abdul Rachman' (1906-49): One Aspect of Japanese-Indonesia Relationships," *Journal Indonesia*, no. 22 (1976): 57-69, <https://www.jstor.org/stable/3350977>., p. 59.

Memasuki fase ketiga dominasi ekonomi Jepang mulai terlihat, Hindia-Belanda menjadi target utama dalam perdagangan industri tekstil Jepang. Malahan Jepang berhasil meningkatkan nilai persentase ekspor ke Hindia-Belanda dari 9.5 % pada tahun 1929, menjadi 17% pada tahun 1933.⁶⁶ Sampai tahun 1933/1934 nilai persentase ekspor Jepang sekitar 17% namun persentase itu memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan persentase ekspor British-India ke Hindia-Belanda. Seperempat dari total keseluruhan produk ekspor Jepang merupakan tekstil, oleh karena itu produk-produk tekstil Jepang berhasil menguasai pasar Hindia-Belanda.

Produk-produk lain Jepang juga cukup diterima penduduk Hindia-Belanda. Bahkan sampai tahun 1932 variasi produk Jepang menjadi semakin beragam tidak terbatas pada produk tekstil saja, melainkan produk-produk rumah tangga, tembikar, otomotif, kaca dan turunannya, sampai produk semen, barang elektronik, dan sabun.⁶⁷ Pada periode ini dapat dikatakan produk-produk Jepang mendominasi pasar Hindia-Belanda, hampir tidak ada produk yang tidak bisa disaingi oleh Jepang. Superioritas produk Jepang juga diimbangi dengan arus perantau Jepang ke Hindia-Belanda.

Populasi perantau Jepang pada tahun 1930 diperkirakan sekitar 6500 jiwa, terkonsentrasi di pulau Jawa dengan jumlah keseluruhan sekitar 5000 jiwa, 2250 jiwa di Jawa Timur dengan 15% atau 1371 jiwa berada di Surabaya.⁶⁸ Perantau Jepang di Hindia-Belanda sebagian besar bekerja dibidang perdagangan retail dan

⁶⁶ Dick, "Japan's Economic Expansion in The Netherland Indies between the First and Second World Wars." *Loc.cit.*

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 253.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 251.

eceran, serta sebagian bekerja pada bidang Jasa. Penetrasi ekonomi pada periode sebelumnya dimanfaatkan perantau Jepang untuk mengembangkan sistem jaringan perdagangan sendiri, didukung oleh perkembangan jalur pelayaran dan transportasi. Fase ini bisa dikatakan sebagai masa kegemilangan ekonomi Jepang, dan penetrasi Jepang pada fase sebelumnya membuahkan hasil yang menguntungkan.

Kebijakan ekspansionisme Jepang semakin terlihat terutama menjelang fase ketiga, sejalan dengan perkembangan dalam negeri Jepang yang menuju negara militeristik dan ultranasionalisme. Konsep dasar legitimasi dikembangkan sebagai penguatan ekspansionisme Jepang pada gagasan *taishō nanshin-ron*. Sehingga dalam gagasan *shōwa nanshin-ron* mulai menambahkan konsep-konsep penguatan legitimasi ekspansionisme, seperti konsep “Jalan Kekaisaran”⁶⁹ atau bahkan konsep “*Hakko Ichiu*” yang menjadi dasar ekspansionisme Jepang sejak tahun 1940. Sejalan dengan perkembangan itu, semangat pan-Asianisme mulai disebarkan ke Asia Tenggara, beriringan dengan migrasi penduduk Jepang pada periode ini. Dengan demikian periode ini menjadi salah satu fundamental pendudukan Jepang kelak, karena mengawali penyebaran propaganda Jepang demi kelancaran perang Asia Timur Raya.

⁶⁹ Konsep “Jalan Kekaisaran” (*kōdōshugi*) beranggapan bahwa bangsa Yamato (Bangsa Jepang) merupakan bangsa utama dan bangsa pilihan yang lebih superior dibandingkan bangsa-bangsa lainnya. Lihat: Shimizu, “Nanshin-Ron: It’s Turning Point in World War I.” *Op.cit.* p.394.

2.2 Perang Asia Timur Raya

2.2.1 Alasan Pendudukan Jepang ke Indonesia

Kedatangan Jepang ke Indonesia diawali dengan kebutuhan Jepang terhadap sumber daya untuk menggerakkan roda Industrialisasinya dan menopang jalanya perang Asia Timur Raya, dibuktikan dengan data tahun 1939 dua pertiga dari kebutuhan minyak Jepang disuplai dari Amerika Serikat.⁷⁰ Ketergantungan itu membawa permasalahan pada tindakan ekspansionisme Jepang, pada bulan Juli 1939 pasokan minyak dari Amerika Serikat dihentikan akibat dari ekspansi Jepang ke wilayah di Tiongkok. Secara praktis aksi Amerika Serikat itu memiliki harapan agar Jepang bisa menarik diri dari ekspansi wilayah ke Tiongkok. Blokade ekonomi terus dilakukan oleh Amerika Serikat dan Sekutunya sampai tahun 1941.

Namun blokade ekonomi itu gagal dalam menghentikan pergerakan Jepang untuk merebut beberapa wilayah kekuasaan jajahan bangsa Eropa di Asia Tenggara yang saat itu sedang terlibat Perang Dunia Kedua di front Eropa. Malahan tindakan blokade ekonomi itu menjadi katalis ekspansionisme Jepang yang telah berkembang dari periode-periode sebelumnya. Berawal dari dorongan kelangkaan sumber daya, Jepang kemudian berusaha membuat pembenaran tindakan ekspansionismenya ke wilayah-wilayah di Asia Tenggara, dipilihlah sebuah konsep *hakko ichiu*, sebagai dasar legitimasi dalam melakukan pendudukan militer di wilayah Asia.

⁷⁰ Aiko Kurosawa, *Masyarakat Dan Perang: Asia Timur Raya, Sejarah Dengan Foto Yang Tak Terceritakan* (Depok: Komunitas Bambu, 2016). hlm. 7.

Hakko ichiu merupakan slogan dengan tujuan utama menyatukan Asia dengan Jepang sebagai pemimpinya, bahkan beberapa perwira Jepang mengartikannya dengan “*all asian nation are brother.*”⁷¹ Sebuah konsep yang ditafsirkan untuk membebaskan Asia dari cengkeraman bangsa Eropa. Disamping itu, terdapat sebagian penduduk Jepang yang mengartikan dengan ekstrem bahwa mereka melakukan tugas suci untuk membebaskan bangsa Asia, dan perang yang dilakukan adalah perang suci. Mereka mengistilahkan penyebutan perang suci itu dengan nama *Dai Toa Senso Senkum*,⁷² atau perang Asia Timur Raya. Umumnya tugas suci itu sangat dipercayai oleh tentara dan masyarakat Jepang, kendati demikian keperluan akan logistik dan sumber daya merupakan latar belakang utama dibalik itu semua.

Kekurangan sumber daya, logistik serta semangat membara dalam jiwa militer mengantarkan pemerintah militer Jepang memilih jalan bersenjata. Jepang mengawali partisipasinya pada perang dunia kedua dengan pendaratan pasukan militer Jepang di wilayah Pattani-Sinkra di Thailand, serta di wilayah Kotabaru di British Malaya pada tanggal 8 Desember 1941. Baru satu jam kemudian menyerang Pearl Harbour, di Hawaii yang pada saat itu menjadi basis terbesar angkatan laut Amerika Serikat di wilayah Asia Pasifik.⁷³ Pasca kedua serangan tersebut, pemerintah militer Jepang turut melaksanakan rencananya yaitu dengan merebut

⁷¹ Theodor Friend, *The Blue-Eyed Enemy: Japan Against The West in Java and Luzon* (New Jersey: Princeton University Press, 1988). p. 61.

⁷² *Dai Toa Senso Senkum* merupakan istilah yang digunakan Jepang dalam menyebut Perang Pasifik dalam Perang Dunia II. Istilah ini memperkuat alasan yang sebenarnya dari pendudukan Jepang ke wilayah Asia Tenggara untuk mendapatkan sumber daya demi melanjutkan jalannya perang. Lihat: Kurosawa, *Masyarakat Dan Perang: Asia Timur Raya, Sejarah Dengan Foto Yang Tak Terceritakan*. hlm. vii.

⁷³ *Ibid.* hlm. 12.

dan menduduki wilayah-wilayah koloni bangsa barat di Asia Tenggara, termasuk wilayah-wilayah Malaya, Thailand, Filipina dan Indonesia.

Terdapat makna tersirat mengenai awal Jepang melakukan penyerangan ke wilayah British Malaya dan Pearl Harbour, Hawaii. Pertama penyerangan ke British Malaya dapat dimaknai dengan secara langsung Jepang menyatakan perang terhadap Inggris, yang secara langsung sedang terlibat Perang Dunia II. Kedua penyerangan terhadap Pearl Harbour, di Hawaii dapat dimaknai sebuah langkah strategis Jepang untuk mencegah bantuan logistik militer Amerika Serikat terhadap negara-negara Sekutunya di Asia Tenggara. Secara geopolitik pangkalan Amerika Serikat itu menjadi hambatan Jepang dalam melakukan ekspansi ke Asia Tenggara.

Amerika Serikat dalam pandangan Jepang menjadi hambatan utama dalam kegiatan ekspansionismenya mengingat posisi militer Amerika Serikat di Pasifik cukup kuat. Selain itu alasan lain penyerangan itu adalah ingin mengembalikan harga diri bangsa Jepang, sebagai akibat dari *Washington Naval Treaty*,⁷⁴ yang membatasi militer Jepang dalam membangun kekuatan angkatan lautnya. Dalam sudut pandang militer Jepang, keputusan dalam traktat Washington itu mencederai semangat bushido dan pejuang mereka. Walaupun begitu alasan penyerangan Amerika Serikat juga dipandang dari penerapan blokade ekonomi terhadap Jepang, dan dilihat dari sudut pandang Jepang tindakan tersebut mengindikasikan bantuan terhadap sekutu yang saat itu sedang berperang di Eropa.

⁷⁴ Washington Naval Treaty, merupakan perjanjian antara 5 Negara pemenang Perang Dunia I, yaitu Amerika, Inggris, Italia, Jepang, dan Prancis. Perjanjian ini berlangsung pada tahun 1922, untuk membatasi pembuatan armada kapal laut negara-negara sekutu pasca Perang Dunia I, walaupun kapal destroyer, kapal selam, dan fregat tidak dibatasi pembuatannya, namun beratnya mengalami pembatasan tidak boleh lebih dari 10.000 ton. Lihat: Onghokham, *Runtuhnya Hindia Belanda* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014). hlm. 15.

Berkenaan dengan Hindia-Belanda, pasca pembatasan ekspor minyak oleh Amerika Serikat pada tahun 1939 Jepang sebenarnya telah membidik Hindia-Belanda sebagai opsi lain penghasil minyak bumi. Oleh karena itu, Jepang melakukan serangkaian diplomasi dengan pihak Hindia-Belanda tepatnya pada September 1940. Namun, diplomasi tidak menemukan titik temu dan harus berakhir pada Juni 1941.⁷⁵ Membuat Jepang sadar bahwa satu satunya cara mendapatkan cadangan minyak dari Hindia Belanda dengan melakukan tindakan militer. Dibuktikan dengan pasca penyerangan terhadap pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbour-Hawaii Jepang melanjutkan serangkaian serangan ke wilayah Hindia-Belanda.

2.2.2 Kedatangan Jepang ke Indonesia

Pemerintah Kerajaan Belanda memilih untuk menyatakan perang terhadap Jepang, setelah tindakan penyerangan terhadap jajahan Inggris. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari posisi keluarga kerajaan Belanda yang mengungsi ke Inggris setelah kerajaan Belanda jatuh dan diduduki Jerman pada Mei 1940. Pasca pernyataan perang terhadap Jepang, pasukan militer Jepang mulai menyerang wilayah jajahan Belanda pada tanggal 10 Januari 1942, dan hingga puncaknya pangkalan Inggris di Singapura berhasil ditaklukkan pada 15 Februari 1942.⁷⁶ Perlawanan dari pihak Belanda tidak terlalu besar, karena militer dalam pemerintah kolonial Belanda didominasi oleh bangsa Eropa, serta partisipasi pribumi dalam militer sangat kecil.

⁷⁵ Kurosawa, *Masyarakat Dan Perang: Asia Timur Raya, Sejarah Dengan Foto Yang Tak Terceritakan*. *Op.cit.*, hlm. 7.

⁷⁶ M. C. Riclefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, first ed. (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2022). hlm. 418.

Berbanding terbalik dengan pihak Jepang yang memiliki keunggulan dalam segi sumber daya manusia, dan teknologi militer.

Upaya mobilisasi pribumi dalam angkatan militer sebenarnya sudah beberapa kali diusulkan, bahkan sejak Perang Dunia I para pemimpin nasionalis Indonesia mengusulkan *Indie Weerbaar* (Hindia yang Berketahanan), yaitu upaya untuk membuat dinas umum militer bagi masyarakat pribumi. Pemerintah Hindia-Belanda menolak usulan tersebut dan hanya mengizinkan dibentuknya *inheemse militie*⁷⁷ (milisi pribumi) pada akhir tahun 1941, terbatas untuk pribumi dengan kekuatan 1000 orang.⁷⁸ Pemerintah Hindia-Belanda terlalu takut untuk mengambil risiko membuat dinas umum pribumi dalam unit militernya. Ketakutan itu cukup beralasan karena pada saat itu semangat kemerdekaan Indonesia masih kuat, serta ketakutan unit dinas militer pribumi tersebut digunakan balik melawan kekuasaan Hindia-Belanda.

Dari sisi komando militer pemerintah Belanda juga mengalami kendala, pasalnya wilayah negeri Belanda telah dikuasai musuh dan pemerintahan resmi Kerajaan Belanda sedang mengungsi di Inggris. Keadaan dalam pengungsian membuat Kerajaan Belanda tidak dapat mengambil keputusan dengan baik dan efektif, lantaran moral serta semangat telah jatuh pasca kejatuhan wilayahnya oleh Jerman pada bulan Mei tahun 1940. Moral dan semangat sangat memengaruhi

⁷⁷ *Inheemse Militie* merupakan kewajiban bela negara asli warga Hindia-Belanda untuk membantu pemerintah Belanda, berkenaan dengan adanya ancaman dari Jepang. Hingga 1941, pemerintah berhasil mengumpulkan 6000 milisi dengan keanggotaan terbatas warga negara Hindia-Belanda asli dan Pribumi. Lihat: Dian Andika Winda et al., *Kamus Sejarah Indonesia Jilid I: Nation Formation (1900-1950)*, ed. Susanto Zuhdi and Nursam (Jakarta: Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, 2017)., hlm. 99.

⁷⁸ N. Hidayat, *Dibawah Kibaran Bendera Matahari Terbit: Ikhtisar Sejarah Pendudukan Jepang Di Indonesia, 1942-1945* (Jakarta: Nilia Pustaka, 2007). Hlm. 9

jalannya peperangan, terbukti dengan perlawanan yang kurang maksimal ketika Jepang datang ke Hindia-Belanda.

Penduduk pribumi turut mengalami dilema dalam memilih sikap saat peperangan telah terjadi. Kebingungan itu cukup beralasan karena posisi Belanda di Indonesia yang dapat dikatakan masih dijajah. Bahkan dalam beberapa wilayah penduduk Indonesia turut membantu dalam melakukan penyerangan kepada pihak Belanda. Hal itu beralasan dengan beberapa bulan sebelum penyerangan ke Indonesia, radio Jepang turut memberitakan akan membebaskan bangsa Asia dari cengkeraman penjajahan, turut diputar lagu Indonesia Raya dalam pemberitaan radio Jepang itu.⁷⁹ Makna dari pemutaran lagu Indonesia raya, membawa dampak politis yang besar bagi penduduk Indonesia yang mendengar lagu tersebut di radio, secara tidak langsung Jepang secara efektif berhasil menggalang dukungan penduduk Indonesia.

Beberapa penduduk Indonesia yang mendukung tindakan Jepang dalam melakukan penyerangan ke Hindia-Belanda juga dilandasi oleh adanya kepercayaan pada hal mistik, berupa adanya ramalan Joyoboyo dalam masyarakat Jawa. Ramalan itu berbunyi, “akan datang bangsa berkulit kuning dari Utara, berperawakan tidak tinggi, pendek pun juga tidak. Mereka itu nanti akan menduduki tanah Jawa, namun hanya seusia tanaman Jagung. Dan akan kembali ke negerinya sendiri, sedangkan tanah Jawa akan dikuasai anak negeri sendiri pula.”⁸⁰ Mereka percaya bahwa Jepang merupakan bangsa dalam ramalan itu dengan

⁷⁹ Ibid. hlm. 13.

⁸⁰ Friend, *The Blue-Eyed Enemy: Japan Against The West in Java and Luzon*. *Op.cit*, hlm. 77.

mencocokkan ciri-ciri dalam ramalan itu. Lebih jauh lagi mereka mempercayai bangsa Jepang juga adalah bangsa yang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan bangsa Belanda.

Kedatangan Jepang ke Indonesia dilakukan melalui tiga rute, pertama mereka berusaha bergerak dari arah Barat melalui semenanjung Malaya dan akhirnya ke Singapura, otomatis setelahnya akan merebut bagian Sumatera. Kedua bergerak dari arah Timur dari kepulauan Filipina pasukan angkatan laut Jepang berfokus pada kepulauan Maluku dan Timor untuk memutuskan bantuan dari Australia, serta merebut wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Terakhir pasukan Jepang akan menyerang Jawa sebagai pusat administrasi dan komando Hindia-Belanda.⁸¹ Strategi tersebut cukup efektif dan berhasil menaklukkan Hindia-Belanda, akhirnya Belanda menyerah terhadap Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, dengan penyerahan diri tersebut menandakan berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia.

Jatuhnya pemerintahan Hindia-Belanda secara kebetulan membuktikan ramalan Joyoboyo, sekaligus menandai awal dari pendudukan Jepang di Indonesia. Kedatangan Jepang ke Indonesia mendapat sambutan hangat dari masyarakat Indonesia, hampir setiap masyarakat Indonesia memiliki harapan positif pada Jepang sebagai negara pembebas dari bangsa Eropa. Kendati demikian Jepang memiliki rencananya sendiri dalam mengelola Indonesia.

⁸¹ Ibid. hlm. 56.

2.2.3 Kebijakan Politis Jepang di Indonesia

Mengulang kembali mengenai alasan kedatangan Jepang ke Asia Tenggara tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan akan sumber daya untuk menunjang perang suci Asia Timur Raya. Oleh karena itu kebijakan Jepang di Indonesia digunakan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan sumber daya yang dimiliki oleh wilayah-wilayah di Asia Tenggara, serta digunakan secara efektif demi menunjang kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya, yang dilandasi oleh semangat *hakko ichiu*, kemakmuran Asia Timur Raya dengan Jepang sebagai pemimpinnya.

Kebijakan yang diambil pada masa pendudukan Jepang memiliki mekanisme dan birokrasi yang berbeda antara pemerintahan dalam negeri Jepang, dengan pemerintahan Jepang di luar Jepang⁸². Selama masa perang kedua keputusan dalam dan luar negeri diambil oleh *Tokyo War Cabinet*, namun dalam pemerintahan dalam negeri Jepang pelaksanaan keputusan tersebut masih dijalankan oleh pemerintahan sipil, dan pemerintahan luar Jepang sepenuhnya berada ditangan kekuasaan militer.

Kekuasaan militer itu tercermin dalam pembagian wilayah-wilayah hasil ekspansionisme ke dalam beberapa wilayah operasi militer dan sepenuhnya dijalankan oleh angkatan darat tentara kekaisaran Jepang, dengan sebagian kecil melalui angkatan laut.⁸³ Salah satu bukti adanya pemisahan ini bisa dilihat dari struktur birokrasi dalam pemerintahan militer di Asia Tenggara terdapat

⁸² Istilah dalam dan luar Jepang dimaksudkan untuk memisahkan pemerintahan Jepang di negara Induknya atau dalam negara Jepang sendiri, serta pemerintahan luar Jepang, yaitu wilayah diluar negara Jepang yang berhasil diduduki selama perang Asia Timur Raya berlangsung. Seperti, wilayah Burma, Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Filipina.

⁸³ William H. Newell, ed., *Japan in Asia* (Singapore: Kent Ridge Singapore: Singapore University Press, 1991). hlm. 2-3.

departemen pendidikan, kegiatan ini dilakukan oleh beberapa perwira militer dan sepenuhnya terpisah dari departemen pendidikan yang berada di dalam negeri Jepang. Kendati demikian tenaga pengajar yang dibutuhkan direkrut melalui departemen pendidikan di Jepang. Keahlian khusus yang berkaitan dengan skill tertentu memang perlu melibatkan pihak sipil, dan pemerintahan militer Jepang melakukan hal itu untuk merekrut tenaga pendidik.

Maksud dari perbedaan ini agar terdapat sekat pemisah antara pemerintahan sipil dalam negeri Jepang dan pemerintahan militer di luar Jepang, yang berkaitan langsung dari hasil pelaksanaan kebijakan yang diterapkan. Pemerintahan sipil biasanya bersifat lebih lunak dan umumnya mempertimbangkan beberapa aspek kompleks khususnya berkaitan dengan moral, etika, dan budaya. Sedangkan dalam pemerintahan militer tujuan menjadi jelas yaitu untuk memenangkan peperangan menggunakan segala cara tanpa mempertimbangkan aspek-aspek kompleks dan biasanya lebih sederhana.

Pendudukan militer Jepang pada setiap wilayah di Asia memiliki kesamaan, yaitu memiliki 4 tujuan, yaitu pertama pertahanan, kedua eksploitasi wilayah untuk mendapatkan sumber daya alam demi menopang jalannya perang asia timur raya, ketiga asimilasi politik dan ekonomi dalam semangat asia (pan-asia) dengan kontrol penuh Jepang. Keempat menggunakan wilayah yang dikuasai sebagai dasar untuk kemajuan asimilasi lebih jauh.⁸⁴ Keempat tujuan tersebut juga tercermin dalam pendudukan di Indonesia, Jepang menggunakan Indonesia sebagai sumber daya

⁸⁴ Robert S. Ward, *Asia for the Asiatics?: The Techniques of Japanese Occupation*. (Chicago: University of Chicago press, 1945). p. Vii.

tambahan dalam melakukan pertahanan melawan sekutu, sumber daya strategis turut digunakan demi kemenangan perang, pendekatan yang dilakukan Jepang terhadap masyarakat Indonesia dilakukan menggunakan berbagai cara demi tercapainya tujuan mulia semangat Asia. Terakhir untuk asimilasi lebih jauh Jepang menawarkan sebuah kemerdekaan dengan membantu Jepang memenangkan perang Asia Timur Raya.

Pasca penyerahan diri dari Hindia-Belanda, pemerintah Jepang secara langsung sudah menjelaskan jenis pemerintahannya melalui pidato Jenderal Imamura. Dalam pidato itu dengan jelas pemerintah Jepang untuk saat ini tidak akan melibatkan pribumi dalam pemerintahan tertinggi, melainkan untuk sementara waktu Jepang akan menerapkan pemerintahan militer dengan tujuan agar keamanan dan ketertiban dapat tercapai dengan baik. Walaupun begitu, pemerintahan militer Jepang di Indonesia memiliki perbedaan dengan wilayah-wilayah lain di Asia yang telah diduduki Jepang. Pemerintahan militer di Indonesia Jepang tetap melibatkan pribumi,⁸⁵ walaupun kontrol tertinggi tetap dalam kendali pemerintahan militer. Posisi pribumi mengisi posisi-posisi staf yang diawasi langsung oleh pemerintah militer, sehingga dalam hal ini dalam pendudukan di Indonesia mengombinasikan pemerintahan sipil dengan kontrol pemerintahan militer.

Kebijakan militer Jepang yang diputuskan melalui keputusan *Tokyo War Cabinet* mengandung asas sentralisasi dan desentralisasi. Khususnya kebijakan

⁸⁵ Lebih jelas dalam sebuah artikel berjudul "Problems of bureaucratic organization" menjelaskan secara langsung bahwa Indonesia diberikan *nominal puppet administration*, atau pemerintahan boneka sekaligus melibatkan penduduk pribumi. Hal ini menjadi titik yang membedakan dengan wilayah lain di Asia Tenggara. Lihat dalam: William H. Newell, ed., *Japan in Asia*. p. 3.

awal yang diterapkan lebih mengedepankan asas sentralisasi, serta pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengembalikan ketertiban umum, mempercepat penguasaan pada sumber daya vital untuk kepentingan pertahanan nasional, dan memastikan kemandirian ekonomi bagi setiap personel militer.⁸⁶ Dengan asas sentralisasi tersebut sejatinya pemerintah militer Jepang berusaha untuk melakukan efisiensi untuk memudahkan dalam penerapan kebijakan umum dan pelaksanaannya di setiap wilayah yang diduduki, selanjutnya kebijakan-kebijakan spesifik yang berkaitan dengan karakteristik wilayah dapat dibuat sesuai dengan daerah kekuasaan militer tiap angkatannya.

Adapun batasan dari pengembalian ketertiban umum dalam kebijakan awal ini mencangkup pada pengembalian hukum, melancarkan ekonomi, kerja sama dengan pemerintah lokal untuk mengembalikan jalannya pemerintahan di tiap-tiap wilayah yang dikuasai. Selanjutnya bertahap pada berusaha melakukan langkah strategis untuk mendapatkan sumber daya vital yang dapat digunakan dalam pertahanan nasional seperti pelabuhan, jalur kereta api, bandara, serta jaringan komunikasi. Selain itu berusaha mencari kemungkinan untuk mengirimkan logistik ke Jepang, dan membatasi perdagangan internasional khususnya berkaitan dengan sumber daya vital berupa minyak bumi, bahan tambang, dan aset penunjang perang lainnya.

⁸⁶ Tertuang dalam Document No.1 tentang "Prinsip yang mengatur administrasi daerah selatan yang berhasil diduduki." Diputuskan dalam konferensi gabungan antara Kantor Pusat Militer Kekaisaran Dan Pemerintah Jepang, pada 20 November 1941. Lihat: Harry J Benda, James K. Irikura, and Koichi Kishi, *Japanese Military Administration* (New Haven: Yale University Press, 1965). p. 1

Asas sentralisasi juga terlihat dalam seruan khusus dari kantor pusat militer kekaisaran dan pemerintah Jepang, untuk menyerukan adanya kerja sama kooperatif antara angkatan darat dan angkatan laut.⁸⁷ Seruan itu berisi tentang pembagian wilayah administrasi militer antara angkatan darat dan laut, perizinan pengoperasian basis angkatan laut di beberapa wilayah administrasi militer angkatan darat, kerja sama dalam pembuatan fasilitas-fasilitas pendukung militer mengesampingkan wilayah kekuasaan angkatan darat dan laut, serta penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan angkatan darat untuk mengamankan sumber daya dan wilayah yang diduduki, sedangkan angkatan laut akan berhadapan dengan angkatan laut musuh demi mengamankan jalur transportasi logistik perang.

Hal senada juga dilakukan pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Kebijakan awal pemerintahan militer Jepang juga membahas untuk mengembalikan ketertiban umum. Harapannya ketertiban umum ini bisa melahirkan rasa aman,⁸⁸ sehingga masyarakat Indonesia bisa menerima sepenuhnya pemerintahan militer Jepang. Baru selanjutnya pemerintah militer Jepang berusaha untuk mewujudkan mengambil alih objek vital nasional utamanya yang dapat digunakan secara langsung untuk memperkuat pertahanan nasional, dan terakhir berusaha memenuhi kemandirian ekonomi dari setiap perwira militer yang berpartisipasi langsung demi kemajuan Asia Timur Raya.

⁸⁷ Ibid. p. 4-11.

⁸⁸ Rasa aman sangat penting dalam kehidupan manusia, sejalan dengan pendapat Abraham Maslow mengenai lima tahapan dalam kebutuhan dasar dan keinginan dalam manusia, yaitu kebutuhan fisiologi, rasa aman, cinta, memiliki harga diri, dan aktualisasi diri. Lihat: Fitri Rachmiati Sunarya, "Urgensi Teori Hierarki Kebutuhan Dari Abraham Maslow Dalam Sebuah Organisasi," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* Vol. 9, no. 2 (2022): 647–658. hlm. 649

Keputusan kedua dari *Tokyo War Cabinet* pada pemerintah militer Jepang di wilayah-wilayah yang berhasil diduduki lebih mengedepankan asas desentralisasi. Adapun pertimbangan dalam pembagian wilayah kekuasaan militer tersebut didasarkan pada tingkat kemajuan sumber daya manusia, dan pentingnya sumber daya untuk jalannya perang. Terlihat dalam pembagian wilayah Indonesia menjadi tiga bagian daerah kekuasaan pasukan militer Jepang. Tiga bagian pemerintahan militer itu terdiri atas, Sumatera ditempatkan di bawah Angkatan Darat ke-25 atau *Tomi Grup*, sedangkan Jawa dan Madura berada di bawah Angkatan Darat ke-16 atau *Osamu Grup*; kedua wilayah tersebut berada di bawah Tentara Area atau *Hōmen-gun*.⁸⁹ Angkatan Darat ke-7 dengan markas besarnya di Singapura. Sedangkan untuk wilayah Kalimantan, dan Indonesia bagian timur dikuasai oleh Angkatan Laut.⁹⁰

Keadaan geografis Indonesia berupa kepulauan menyulitkan jalannya komando tunggal dalam sistem birokrasi yang disusun pemerintah militer Jepang. Oleh karena itu pemerintah militer Jepang memisahkan penguasaan wilayah-wilayah di Indonesia menjadi tiga bagian. Pembagian ketiga wilayah turut memengaruhi arah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah militer Jepang, sehingga pada awal pendudukan arah kebijakan disesuaikan dengan wilayah tempat berkuasanya. Jawa dengan pendekatan halus, Sumatera dengan pendekatan yang

⁸⁹ *Hōmen-gun* secara bahasa dapat diartikan sebagai tentara area, atau dalam perspektif barat merupakan *Field Army* atau tentara lapangan, yang membawahi satu area khusus seperti Tentara Area Angkatan Darat ketujuh yang membawahi wilayah Indonesia, Malaya, dan Singapura. Lihat: United States War Department, *Technical Manual Handbook of Japanese Military Forces* (Washington: United States Government Printing Office, 1944). p. 17.

⁹⁰ Benda, K. Irikura, and Kishi, *Japanese Military Administration*. *Op.cit.*, hlm. 53-56.

moderat, serta Kalimantan dan Indonesia Timur yang cenderung menggunakan kebijakan keras-mengikat.

Wilayah pendudukan militer tentara ke-16 angkatan darat Jepang lebih berfokus pada menarik simpati masyarakat, karena pada saat itu wilayah Jawa dan Madura memiliki keuntungan dalam sumber daya manusia, dan paling maju diantara wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Bertolak belakang dengan wilayah lain, utamanya yang dikuasai angkatan laut. Pemerintah militer Jepang bersikap lebih keras dan menindas, dengan alasan pandangan pemerintah militer Jepang terhadap wilayah-wilayah luar Jawa kurang dalam hal politik dan sumber manusia, namun penting dalam ekonomi terutama dalam hal sumber daya alam.⁹¹

Pemisahan kebijakan antara satu dengan yang lainnya membuat jurang pemisah antara kualitas politik dan sumber daya manusia antara wilayah satu dan yang lainnya. Wilayah Jawa dianggap sudah maju dan memerlukan pendekatan halus, berbanding terbalik dengan wilayah Sumatera yang baru diizinkan berkaitan dengan politik pada menjelang akhir perang, sedangkan dengan wilayah Kalimantan, Sulawesi dan wilayah Indonesia Timur lain, Jepang menganggap mereka kurang dalam segi perpolitikan dan menerapkan pendekatan lebih keras dan menindas.

⁹¹ Keputusan mengenai pemisahan kekuasaan antara angkatan laut dan angkatan darat telah diputuskan pada Document no. 2 tentang, "Kesepakatan Pusat antara Angkatan Laut dan Angkatan Darat dalam administrasi militer daerah yang berhasil diduduki." Pada 26 November 1941. Secara khusus angkatan darat dijelaskan akan diberikan wilayah dengan populasi yang besar, serta dengan permasalahan administrasi yang kompleks, sedangkan angkatan laut akan diberikan wilayah yang berharga dalam padangan ekonomi dan untuk kedepannya, namun dalam segi sumber daya manusia lebih sederhana (atau primitif). Hal ini karena angkatan darat bisa lebih fokus dalam mengamankan sumber daya manusia, dan angkatan laut lebih fokus untuk melawan kekuatan angkatan laut sekutu, sehingga porsi masing-masing dapat dikatakan setara. Lihat: Ibid. hlm. 7-8

Struktur pemerintah militer Jepang di Indonesia bersifat universal atau memiliki kesamaan di setiap wilayahnya, seperti dalam setiap pemerintahan dibawah pendudukan angkatan darat akan terdiri atas komandan tinggi (*gunseikan*),⁹² staf Pengelola administrasi militer (*gunseikanbu*), serta beberapa departemen penunjang pendudukan Jepang di Indonesia, seperti departemen urusan umum (*Somubu*), departemen dalam negeri (*Naimubu*), departemen keamanan publik (*Keimubu*), departemen keuangan (*Zaimubu*), departemen industri (*Sangyobu*), departemen komunikasi, departemen administrasi militer, departemen pengelola properti musuh, departemen urusan agama (*Shūmubu*), departemen kehakiman (*Shidobu*), departemen propaganda (*Sendenbu*), biro tambahan, bagian Investigasi dan penelitian.⁹³ Beberapa hal yang membedakan pemerintahan di Jawa, dan Sumatera adalah dalam pemerintahan di Jawa terdapat departemen propaganda, selebihnya sama antara satu dengan yang lainnya.

Sedangkan dalam pemerintahan angkatan laut terdapat penyederhanaan dalam struktur pemerintahan militer seperti, pemerintahan pusat, panglima tertinggi militer armada barat daya, membawahi beberapa biro; pemimpin biro urusan umum, pemimpin biro keuangan, pemimpin biro Industri, pemimpin biro kesehatan, pemimpin biro transportasi publik, pemimpin biro pengadilan. Bagian

⁹² Komandan *gunseikan* merupan komandan yang memerintahkan daerah pemerintahan militer (*gunseikan*). Pada pemerintahan di Jawa pemimpin *gunseikan* merupakan komandan tertinggi angkatan darat ke-16, dengan nama julukan grup *osamu*. Sedangkan pemimpin tertinggi wilayah militer di Sumatera dan Malaya dibawah pendudukan angkatan darat ke-25 dengan nama julukan grup *tomi*, namun pada 1943 secara spesifik angkatan darat ke-25 hanya menguasai wilayah Sumatera, dengan ibukotanya di Bukittinggi. Lihat: Ibid. hlm. 54-57 dan N. Hidayat, *Dibawah Kibaran Bendera Matahari Terbit: Ikhtisar Sejarah Pendudukan Jepang Di Indonesia, 1942-1945*. hlm. 18.

⁹³ Bu atau departemen merupakan pembagian birokrasi pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Lihat: Winda et al., *Kamus Sejarah Indonesia Jilid I: Nation Formation (1900-1950)*. *Op.cit.*, hlm. 84.

departemen dibagi menurut wilayah kekuasaannya seperti; pemimpin departemen pemerintahan sipil Borneo, pemimpin pemerintahan sipil Sulawesi, pemimpin pemerintahan kepulauan seram.⁹⁴ Adanya penyederhanaan ini tidak lepas dari doktrin dan tujuan angkatan laut kekaisaran Jepang, yaitu membawahi bagian wilayah yang memiliki nilai ekonomi strategis untuk kedepannya dan kurang dalam sudut pandang sumber daya manusia, serta angkatan laut Jepang pada dasarnya akan menjadi panggung utama dalam menggempur armada laut musuh, dan menyediakan jalur transportasi bagi seluruh pemerintahan militer. Maka dengan beban yang diampu oleh angkatan laut akan lebih efisien pemerintahan angkatan laut hanya diberikan wilayah yang sederhana dan memiliki nilai strategis kedepannya.

Dalam paragraf awal dijelaskan adanya pemerintahan sipil di Indonesia, maksud dari pemerintah sipil itu terdiri atas beberapa jabatan publik yang diberikan pada masyarakat pribumi, walaupun tetap jabatan-jabatan tinggi dipegang oleh petinggi militer Jepang. Pemerintah militer membagi Jawa dan Sumatera menjadi beberapa wilayah residen (*shu*), kabupaten (*ken*), kotapraja (*si*), wedana (*gun*), kecamatan (*son*), desa (*ku*), rukun tetangga (*tonari gumi*), setingkat dengan residen ada otonomi khusus yang disebut dengan *kochi* atau kerajaan kecil.⁹⁵ Jabatan Residen biasanya dipimpin oleh perwira tinggi militer Jepang, sedangkan di bawahnya diberikan pada pribumi. Istilah gabungan pemerintahan militer dan sipil

⁹⁴ Benda, K. Irikura, and Kishi, *Japanese Military Administration. Op.cit.*, hlm. 56

⁹⁵ N. Hidayat, *Dibawah Kibaran Bendera Matahari Terbit: Ikhtisar Sejarah Pendudukan Jepang Di Indonesia, 1942-1945.*

berasal dari pemisahan antara jabatan publik dibawah residen yang diberikan pada masyarakat sipil.

Pemerintahan sipil berkuasa pada hal-hal yang telah ditentukan oleh pemerintah militer Jepang, sehingga pemerintah sipil dalam mengambil keputusan terlebih dahulu mempertimbangkan peraturan yang dibuat pemerintah militer. Dalam hal ini pemerintah sipil hanya berkuasa terbatas, atas hal-hal yang diberikan wewenang. Sering kali pemerintahan sipil ini oleh akademisi Eropa disebut dengan *nominal puppet government* atau pemerintahan sipil terbatas. Batasan-batasan yang ditentukan pemerintah militer juga cukup jelas, yaitu dengan membuat undang-undang pendudukan militer di setiap wilayah yang dikuasai, dengan garis haluan perintah dari Jepang.

Peraturan perundang-undangan pendudukan militer yang dibuat pemerintah militer Jepang di Jawa biasanya lebih sistematis, dan komprehensif dibandingkan dengan wilayah pendudukan lain. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari pembagian tugas yang diberikan dalam keputusan pusat *Tokyo War Cabinet*, berupa angkatan darat diberikan wilayah pendudukan dengan populasi yang lebih padat dan dengan dinamika permasalahan yang cukup kompleks. Selain itu Jawa dan Madura dianggap memiliki keuntungan strategis dari segi sumber daya manusia, dan populasi yang dimiliki. Kedua alasan itu, mengakibatkan pemerintah Jepang memilih pendekatan halus atau tidak dengan kekerasan.

Meskipun wilayah Jawa disebutkan pendekatan yang digunakan lebih halus, pada faktanya dalam pendudukan Jepang di Jawa dan Madura tetap membuat serangkaian kebijakan yang mengikat dan memaksa. Secara bertahap pemerintah

militer Jepang mengeluarkan beberapa undang-undang pendudukan militer, sering kali disebut dengan undang-undang dasar pendudukan militer, *osamu seirei*,⁹⁶ dan *osamu kanrei*.⁹⁷ Undang-undang ini mengikat seluruh lapisan masyarakat di Jawa, dari berbagai macam etnis, suku, dan agama. Secara garis besar *osamu seirei* dan *osamu kanrei* merupakan haluan utama dalam pengambilan keputusan di tiap-tiap wilayah pendudukan di pulau Jawa.

Osamu seirei dan *osamu kanrei*, bisa dikatakan sebuah turunan dari keputusan pusat *Tokyo War Cabinet*, serta sebuah uraian lebih lengkap mengenai karakteristik menjemuk dari populasi penduduk di pulau Jawa. Peraturan dalam *osamu seirei* dan *osamu kanrei* sifatnya mengikat, namun dalam praktiknya dikeluarkan secara bertahap, serta beberapa ada yang diubah dan disesuaikan sesuai dengan keadaan sosial-masyarakat pulau Jawa. Kemungkinan ini merupakan makna pendekatan yang lebih halus pada paragraf sebelumnya, karena menyesuaikan keadaan sosial-masyarakat pulau Jawa.

Beberapa kebijakan awal dalam *osamu seirei* menyangkut mengenai pengembalian ketertiban umum di pulau Jawa. Undang-undang No. 1 berisi mengenai menjalankan pemerintahan pendudukan militer. Pemerintah Jepang juga

⁹⁶ *Osamu seirei*, merupakan undang-undang pendudukan militer angkatan darat ke-16. Undang-undang ini merupakan undang-undang tertinggi kedua setelah keputusan dari *Tokyo War Cabinet*, dan undang-undang tertinggi dalam sistem perundang-undangan pendudukan militer Jepang di Jawa yang ditanda tangani langsung oleh *Saiko Shikkikan*. Undang-undang ini berupa aturan dasar dan umum, adapun yang lebih khusus di tetapkan dalam *osamu kanrei*. Seringkali beberapa undang-undang merangkap dengan *osamu seirei*, seperti undang no. 31 dan *osamu seirei* no. 1 tahun 2602 membahas hal yang sama. Berkaitan dengan penomoran disesuaikan dengan waktu dan tahun dikeluarkannya *osamu seirei*. Lihat: Winda et al., *Kamus Sejarah Indonesia Jilid I: Nation Formation (1900-1950)*., hlm. 166.

⁹⁷ *Osamu kanrei*, merupakan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Gunnsaikanbu di Jawa. membahas hal-hal spesifik dan khusus, sekaligus penjelasan spesifik mengenai topik-topik khusus dari undang-undang pendudukan militer Jepang (*osamu seirei*). Lihat: *Ibid*.

dengan jelas menyebutkan bahwa Jepang dan Indonesia merupakan satu bangsa dan turunan, secara halus untuk percaya kepada pemerintahan militer Jepang.⁹⁸ Pasal-pasal dalam undang-undang dasar pendudukan militer, juga membahas mengenai kekuasaan pemerintahan militer tertinggi menggantikan gubernur jenderal, memberlakukan kembali badan-badan pemerintahan, hukum, dan undang-undang terdahulu tetap diakui, selama tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang. Alasan pemberlakuan undang-undang hukum kolonial itu sebagai transisi menuju undang-undang pendudukan militer yang secara bertahap akan diputuskan. Sehingga tidak ada kekosongan hukum yang akan berujung pada sulitnya ditegakkan ketertiban umum.

Secara umum pemerintah pendudukan militer pada tahun 1942 mengeluarkan sebanyak 46 undang-undang dasar pendudukan militer, 17 diantaranya merangkap dengan *osamu seirei*, dan tidak mengeluarkan *osamu kanrei*.⁹⁹ Mengenai isi dari undang-undang tersebut membahas mengenai hal-hal yang mempercepat pulihnya keamanan, ketenteraman, ketertiban, serta menyisipkan maksud lain yaitu mendirikan kemakmuran dibawah pendudukan jepang dengan tujuan asia timur raya, dan menghilangkan pengaruh Hindia-Belanda dalam kehidupan sosial-masyarakat di Pulau Jawa. Termasuk bidang birokrasi, peradilan, hukum, kehidupan sosial, transportasi, komunikasi-informasi, dan pendidikan. Bidang-bidang tersebut mencapai sebuah kesimpulan mobilisasi keseluruhan menjelang akhir perang Asia Timur Raya.

⁹⁸ Gunseikanbu, *Bokoe Pengoempoelan Oendang-Oendang: Diksoesoen Dengan Peroebahan Dan Tambahan Sampai Penghabisan Boelan 6, Tahoen Syoowa 19 (2604)* (Djakarta: Kokumin Tosyokyoku "Balai Pustaka," 1944). Hlm. 1.

⁹⁹ Ibid. Hlm. 389-391.

Pemerintah militer Jepang juga menerapkan sebuah *soft-propaganda* dengan mulai mengenalkan beberapa identitas yang berkaitan dengan Jepang. Salah satunya, 4 kebijakan awal dalam undang-undang pendudukan militer setidaknya membahas mengenai pengenalan budaya Jepang, seperti bendera, perubahan waktu, pengibaran bendera *kokki*,¹⁰⁰ serta merayakan kelahiran kaisar *tenno heika*.¹⁰¹ Beberapa kebijakan itu menjelaskan bahwa Jepang berusaha untuk secara halus menanamkan nilai-nilai budaya Jepang, sekaligus melegitimasi wilayah kekuasaan kekaisaran Jepang.

Melihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah militer Jepang, bisa dikatakan menggunakan konsep *total war*. Sebuah konsep yang muncul sejak revolusi Prancis, perang bukan hanya mengalahkan musuh dalam aspek militer sahaja. Melainkan, perang turut memengaruhi pandangan masyarakat melalui kontrol propaganda, ekonomi, dan militer. Jelasnya menurut pendapat Carl Schmitt, perang dapat secara total dalam artian dengan seluruh kemampuan dengan segala sarana yang ada.¹⁰² Dalam konsep ini sebuah perang total dapat dikatakan sebagai penggunaan ‘total politik’ dengan sepenuhnya mengawasi masyarakat, dengan melakukan kontrol pada aspek ekonomi dan media. Dengan prasyarat awal ‘keseluruhan wilayah’ mencakup seluruh area, keseluruhan manusia, tidak ada

¹⁰⁰ Secara bahasa *kokki* merupakan bendera bangsa Jepang, atau *hinomaru*, sebuah lingkaran merah yang melambangkan matahari terbit. Tjhin Thian Shiang, *Kamus Saku Jepang-Indonesia* (Jakarta: Gakushudo, 2012), hlm. 101.

¹⁰¹ *Tenno heika*, merupakan sebutan dari Kaisar yang berkuasa di Kekaisaran Jepang. Ibid. hlm. 181.

¹⁰² Ungkapan asli dari konsep *total war*, berupa “*war can be total in the sense of the utmost and utmost employment of all available means.*” dapat diartikan sebagai pengerahan keseluruhan sarana dan prasarana yang ada. Lihat: Demm. Ebenhard, “Propaganda and Caricature in the First World War,” *Journal of Contemporary History* volume 28, no. 1 (1993): 163–192. p. 164

intervensi dari pihak lain; sehingga akan mencapai kesimpulan akhir untuk secara sempurna melakukan keseluruhan mobilisasi dalam perang.

Penggunaan konsep *total war* oleh pemerintah militer Jepang terlihat dalam beberapa keputusan dalam sistem undang-undang pemerintah militer, *osamu seirei*, *osamu kanrei*, dan maklumat khusus, secara keseluruhan mencakup berbagai bidang sosial-masyarakat. Melihat sambutan dari masyarakat Indonesia terhadap Jepang, ada sebagian yang menganggap positif dan melakukan kolaborasi. Sebagian masyarakat ini yang menjadi acuan pemerintahan militer Jepang untuk memanfaatkan secara maksimal pendudukan militer Jepang di Indonesia.